

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Tingkat Pendidikan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Tingkat Pendidikan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud pendidikan adalah “Usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan merupakan suatu kondisi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal dan disahkan oleh Departemen Pendidikan sebagai usaha mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Lohanda,2017). Sedangkan Menurut Septarina (2017), tingkat atau jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan tingkat pendidikan adalah tingkatan proses pendidikan formal yang telah dilalui oleh suatu individu yang dibuktikan dengan pemerolehan tanda keterangan kelulusan dari proses pendidikan tersebut. Tingkat pendidikan suatu individu dinyatakan dalam bentuk ijazah atau surat tanda tamat belajar yang telah diperolehnya setelah melalui dan menyelesaikan pembelajaran sejumlah materi ilmu pengetahuan pada kurikulum setiap tingkatan pendidikan. Sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi ilmu pengetahuan serta pengalaman belajar yang secara langsung berpengaruh dalam perilakunya dalam menjalankan kehidupannya atau pekerjaannya.

#### **2.1.1.2 Jalur Pendidikan**

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi

dan memperkaya. Penjelasan mengenai jalur pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Jalur pendidikan sekolah (formal)

Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi). Sifat jalur pendidikan ini adalah formal, yang diatur berdasarkan ketentuan pemerintah, dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.

2. Jalur pendidikan luar sekolah (nonformal)

Jalur pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan. Pendidikan luar sekolah memberikan kemungkinan perkembangan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya. Sifat dari pendidikan luar sekolah adalah tidak formal dalam artian tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional.

3) Jalur pendidikan informal

Jalur pendidikan informal adalah melalui pendidikan yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk

kegiatan belajar secara mandiri. Jalur pendidikan informal ini berfungsi untuk menanamkan keyakinan agama, nilai budaya dan moral, serta ketrampilan praktis.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan terdiri dari:

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pada jenjang ini terdapat dua tingkatan sekolah, yaitu sekolah dasar (SD) / MI atau bentuk lain yang sederajat, dan tingkat sekolah menengah pertama (SMP) / MTs atau bentuk lain yang sederajat.

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi

dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan dan konsentrasi ilmu yang dibutuhkan.

### **2.1.1.3 Fungsi Pendidikan**

Menurut pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### **2.1.1.4 Indikator Tingkat Pendidikan**

Menurut Murina (2017), indikator tingkat pendidikan terdiri dari:

#### **1. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki**

Tingkat pendidikan formal pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional.

#### **2. Bidang pendidikan**

Bidang pendidikan adalah sebelum seseorang direkrut terlebih dahulu perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan pendidikan seseorang

tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

### 3. Kualitas pendidikan

Kualitas pendidikan adalah pengetahuan, penguasaan terhadap tugas, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.

## 2.1.2 Kualitas Pelatihan

### 2.1.2.1 Pengertian Kualitas Pelatihan

Menurut Bangun (2012) pelatihan adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki ketrampilan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pelatihan adalah Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Kualitas merupakan derajat atau tingkat baik buruknya sesuatu. Dengan demikian, kualitas pelatihan adalah derajat baik buruknya proses pelatihan. Kualitas pelatihan dianggap memiliki peran yang sangat penting bagi efektivitas pelatihan. Kualitas pelatihan yang baik akan memberikan pengaruh positif bagi efektivitas pelatihan (Gustina, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelatihan merupakan ukuran keefektifan suatu pembelajaran praktikum yang berkaitan dengan kebutuhan pekerjaan. Semakin tinggi kualitas suatu pelatihan secara langsung semakin efektif ilmu pengetahuan yang diperoleh peserta latihan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pekerjaan dengan baik dan benar.

#### **2.1.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelatihan**

Menurut Gustina (2015), untuk mencapai pelatihan yang berkualitas, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

##### 1) Tujuan

Pelatihan memerlukan tujuan yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan penyusunan rencana aksi (action play) dan penetapan sasaran, serta hasil yang diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan.

##### 2) Sasaran

Sasaran pelatihan harus ditetapkan dengan kriteria yang terinci dan terukur (measurable). Sarana pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan.

##### 3) Pelatih

Mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi

pelatihan harus benar-benar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, professional, dan berkompeten.

4) Materi

Pelatihan sumber daya manusia memerlukan materi atau kurikulum yang sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan.

5) Metode

Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan kemampuan peserta pelatihan.

6) Peserta pelatihan

Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu dan kualifikasi yang sesuai.

### 2.1.2.3 Indikator Kualitas Pelatihan

Menurut Murina (2017), indikator kualitas pelatihan terdiri dari:

1. Bidang pelatihan

Sebelum seseorang mengikuti pelatihan, terlebih dahulu perusahaan menganalisis jenis pekerjaan dan jabatannya seseorang agar nantinya dapat dipikirkan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya.



## 2. Kualitas pelatihan

Kualitas pelatihan dianggap memiliki peran yang sangat penting bagi efektivitas pelatihan. Kualitas pelatihan yang baik akan memberikan pengaruh positif bagi efektivitas pelatihan.

## 3. Jangka waktu pelatihan

Lamanya waktu pelatihan disesuaikan dengan prosedur standar operasional perusahaan.

### **2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Fauzi (2008), teknologi informasi adalah teknologi yang memanfaatkan computer sebagai perangkat utama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi (Murhada, 2011). Pemanfaatan teknologi informasi adalah perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi (Andrianto, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah perbuatan individu

pekerja dalam memanfaatkan alat berbasis teknologi terbaru yang digunakan untuk mengolah informasi dan pekerjaan sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah lebih efektif dan efisien. Semakin baik dan tepat penggunaan teknologi informasi dalam bekerja, maka kualitas pekerjaan akan lebih baik dan lebih tepat sasaran. Sebagai contoh pencatatan akuntansi jika dahulu menggunakan buku dan perhitungan manual, dengan adanya teknologi dapat menggunakan alat berupa software perhitungan data akuntansi yang lebih praktis dan efektif dalam mendukung pekerjaan.

#### **2.1.3.2 Manfaat penerapan Teknologi Informasi**

Menurut Sutarman dalam Shafari (2017) manfaat dari penerapan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Kecepatan (*Speed*)

Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.

### 3. Ketepatan (*Precision*)

Komputer tidak hanya cepat, tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.

### 4. Keandalan (*Reliability*)

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer.

#### **2.1.3.3 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut Andrianto (2017), pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut:

##### 1) Penggunaan teknologi komputerisasi

Teknologi informasi digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun dan menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

##### 2) Pelaporan berdasarkan sistem informasi yang terintegrasi

Dengan adanya integrasi pada seluruh sistem informasi di suatu kantor, dapat memberikan kemudahan bagi pengelolanya, maupun pengguna sistem informasi tersebut.

### 3) Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

## 2.1.4 Pengalaman Kerja Aparatur Desa

### 2.1.4.1 Pengertian Pengalaman Kerja

Menurut Ratnaningsih (2013) pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Pengalaman kerja adalah keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya yang dilihat dari masa kerja, pemahaman akan tugas yang dilaksanakannya, kemampuan menyelesaikan tugasnya, dan penguasaan terhadap pekerjaan (Hermawan, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja adalah pengetahuan dan ketrampilan suatu individu dalam melaksanakan pekerjaannya yang dilihat dari masa kerja yang sudah ditempuhnya. Semakin lama masa kerja suatu individu semakin banyak pengalaman kerja, artinya

memiliki ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam bekerja dan memecahkan masalah pekerjaan.

#### **2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pengalaman Kerja**

Menurut Ahmad dalam Putri (2016), faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja seseorang adalah waktu, frekuensi, jenis, tugas, penerapan, dan hasil. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Waktu**

Semakin lama seseorang melaksanakan tugas akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak.

##### **2) Frekuensi**

Semakin sering seseorang melaksanakan tugas sejenis umumnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik.

##### **3) Jenis tugas**

Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan oleh seseorang maka umurnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak.

##### **4) Penerapan**

Semakin banyak penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam melaksanakan tugas tentunya akan dapat meningkatkan pengalaman kerja orang tersebut.

#### 5) Hasil

Seseorang yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak akan dapat memperoleh hasil pelaksanaan tugas yang lebih baik

#### 2.1.4.3 Indikator Pengalaman Kerja

Menurut Murina (2017), indikator pengalaman kerja terdiri dari:

##### 1. Jangka waktu bekerja

Ukuran seseorang tentang waktu atau masa kerja yang telah di tempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.

##### 2. Bidang pengalaman kerja

Tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan posisi pekerjaannya.

##### 3. Manfaat pengalaman kerja bidang keuangan atau akuntansi

Pengalaman kerja yang dimiliki staf bagian keuangan/akuntansi akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan. Hal ini karena dengan pengalaman kerja profesional tersebut maka staf bagian keuangan/akuntansi

lebih mengerti dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan.

## **2.1.5 Pemahaman Laporan Keuangan Desa**

### **2.1.5.1 Pengertian Pemahaman Laporan Keuangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Kemudian laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.

Dalam hal pertanggungjawaban, Setiadi dalam Murina (2017) mengungkapkan bahwa kepala desa menyampaikan laporan kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang meliputi:

- a. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- c. Laporan program pemerintah dan Pemeintah Daerah yang masuk kedesa.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan buku realisasi anggaran. Bentuk laporan keuangan desa akan digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa, pihak-pihak yang menggunakannya yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

#### **2.1.5.2 Indikator Pemahaman Laporan Keuangan**

Menurut Murina (2017), indikator dari pemahaman laporan keuangan adalah :

##### **1. Proses laporan**

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dengan



tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

## 2. Logika akuntansi

Akuntansi adalah bidang ilmu yang mudah dimengerti namun sulit dipraktekkan. Memahami logika akuntansi merupakan kunci untuk bisa mengimplementasikan dalam laporan keuangan.

## 3. Pemahaman terhadap elemen laporan keuangan desa

Laporan Keuangan digunakan sebagai alat untuk memahami kondisi keuangan perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan keuangan. Agar tujuan itu bisa tercapai, maka harus bisa memahami elemen laporan keuangan.

### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini pernah diteliti oleh penelitian terdahulu mengenai Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Hasil
1.	Sasha Murina dan Rahmawaty, (2017)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>2. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>3. Kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>4. pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> </ol>
2.	Romandhon, (2019)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pengalaman Kerja Aparatur Desa dan Fasilitas Kantor Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Aparatur Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>2. Kualitas pelatihan mempunyai pengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>3. Pengalaman kerja aparatur desa mempunyai pengaruh positif terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>4. Fasilitas kantor mempunyai pengaruh negatif terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> </ol>
3.	Dwi Cahyadi (2009)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Dan Posisi Di	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap</li> </ol>

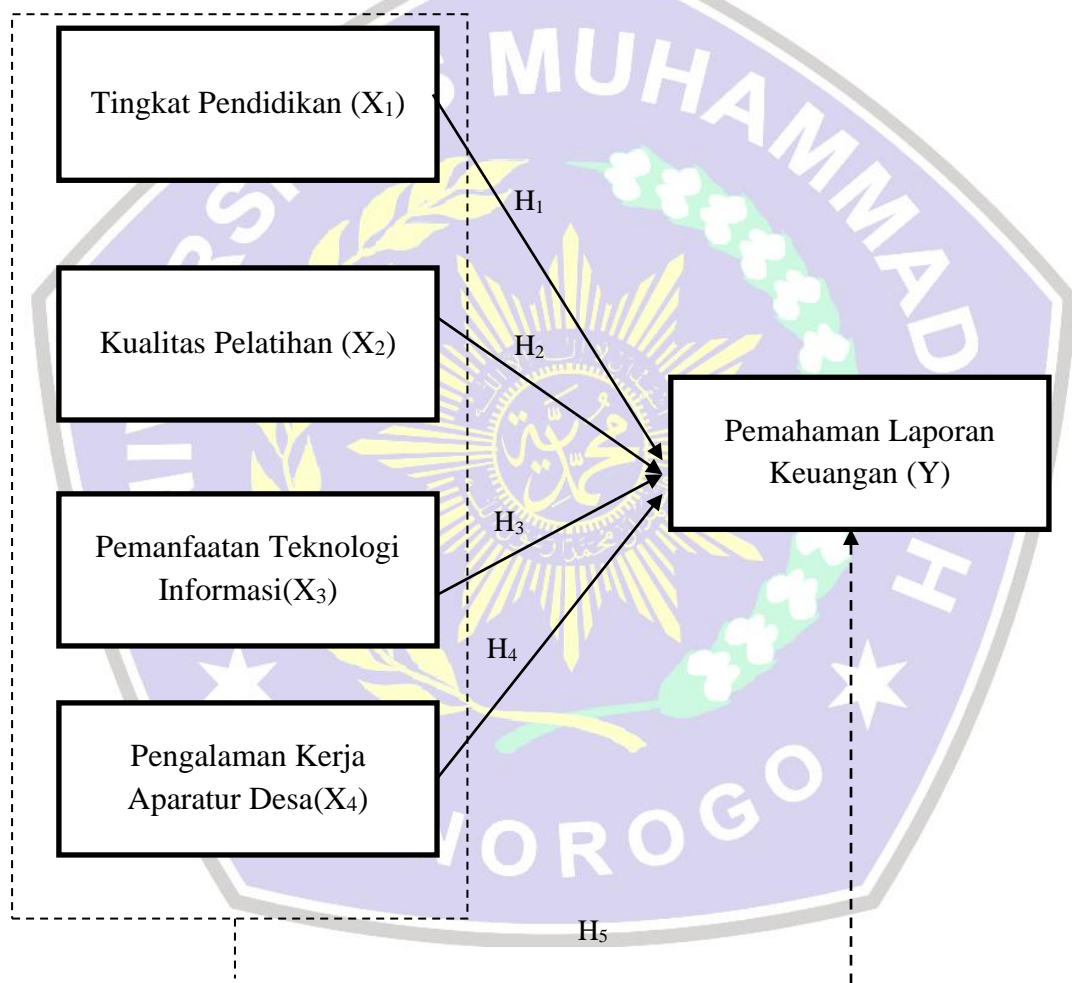
		Pemerintahan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Eksekutif dan Legislatif Di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara)	<p>pemahaman laporan keuangan daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Masa kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah.</li> <li>3. Posisi di pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan daerah.</li> </ol>
4.	Wahyu Dimas Ivan Budi (2019)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa( Studi Empiris Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>2. Kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak aparatur desa berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>4. Pengalaman Kerja tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> <li>5. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.</li> </ol>
6	Cut Yunina Eriva (2003)	Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Masa Kerja Dan Jabatan Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Aceh)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan.</li> <li>2. Pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan.</li> <li>3. Masa Kerja berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan.</li> <li>4. TinJabatan berpengaruh terhadap pemahaman</li> </ol>

			laporan keuangan.
--	--	--	-------------------

Sumber: Ringkasan penelitian terdahulu diolah tahun 2020

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

————> = Pengaruh Variabel X terhadap Y secara parsial

-----> = Pengaruh Variabel X terhadap Y secara simultan

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, penelitian ini memiliki 4 variabel independen yakni Tingkat Pendidikan (X1), Kualitas Pelatihan (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa (X4), sedangkan variabel dependen yang terpengaruhi dalam penelitian ini ialah Pemahaman Laporan Keuangan Desa (Y).

Setiap pengelola keuangan harus memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dipublikasikan dapat disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan. Tanpa pemahaman laporan keuangan yang baik mengakibatkan laporan keuangan yang dipublikasikan terdapat kesalahan material dalam penyajian angka, tidak sesuai dengan pelaporan dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya sehingga berdampak buruk bagi pengguna laporan itu sendiri.

Penelitian sebelumnya telah banyak memberi informasi tentang pemahaman laporan keuangan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan faktor Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa.

## **2.4 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019).

#### 2.4.1 Pengaruh tingkat pendidikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa

Tingkat pendidikan merupakan suatu kondisi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal dan disahkan oleh Departemen Pendidikan sebagai usaha mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Lohanda,2017).

Sumber daya manusia sangat mutlak diperlukan karena untuk melakukan tugas-tugas dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien yang tinggi untuk mencapai berbagai tujuan yang ingin dicapai.

Pengaruh tingkat Pendidikan terhadap pemahaman atas laporan keuangan daerah dikemukakan oleh Cahyadi (2009). Sementara itu penelitian dengan hasil berbeda ditunjukkan oleh Eriva (2013) dan Budi (2019) yang menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman atas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>01</sub> : Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.**

**H<sub>a1</sub>: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.**

#### 2.4.2 Pengaruh kualitas pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan desa

Menurut Bangun (2012) pelatihan adalah proses untuk mempertahankan atau memperbaiki ketrampilan untuk menghasilkan pekerjaan yang efektif.

Dalam penelitian yang dilakukan Ruan (2013) menyatakan pelatihan yang dilaksanakan perusahaan dinilai cukup baik dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Ruan (2013) mengatakan bahwa program pelatihan yang baik, materi pelatihan yang efektif dan efisien dan adanya kesadaran dari tiap-tiap karyawan saling menghargai, saling membantu tiap-tiap permasalahan, jaminan akan timbulnya resiko kerja di hari tua, mampu menghasilkan kinerja yang positif dan signifikan.

Murina (2017) telah melakukan pengujian mengenai pengaruh kualitas pelatihan terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Sementara itu penelitian dengan hasil berbeda ditunjukkan oleh Budi (2019) yang menyatakan kualitas pelatihan tidak berpengaruh terhadap pemahaman atas laporan keuangan Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>02</sub> : Kualitas pelatihan tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.**

**H<sub>a2</sub>: Kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.**

### **2.4.3 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pemahaman laporan keuangan desa**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi (Andrianto, 2017).

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. Pengolahan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer jelas akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Haza, 2016).

Penelitian yang dilakukan Nugroho (2014) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>03</sub> : Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.**



**H<sub>a3</sub>: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa**

#### **2.4.4 Pengaruh pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa**

Menurut Ratnaningsih (2013) pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Pada umumnya pengalaman kerja diukur dengan melihat seberapa lama waktu yang dihabiskan tenaga kerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Karyawan yang mempunyai pengalaman yang lebih lama akan mempunyai keterampilan yang lebih tinggi, sehingga produktivitasnya pun lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang baru memiliki sedikit pengalaman.

Penelitian yang dilakukan Murina (2017) menyimpulkan bahwa pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>04</sub> : Pengalaman kerja aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.**

**H<sub>a4</sub> : Pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa**

#### **2.4.5 Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengalaman Kerja Aparatur Desa Terhadap Pemahaman Laporan Keuangan Desa**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 membuat pemerintah desa akan memperoleh dana yang cukup besar untuk dikelolanya. Di lain pihak tentunya dana yang besar tersebut harus dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menyangkut peraturan pendukungnya dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan.

Murina (2017), dalam hasil penelitiannya terhadap pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa berpengaruh secara simultan terhadap pemahaman laporan keuangan desa.

Variabel tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja aparatur desa memberikan pengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan berdasarkan kelima hipotesis yang telah diturunkan sebelumnya. Sehingga semakin baik tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, fasilitas kantor, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja aparatur desa secara simultan akan meningkatkan pemahaman laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis, yaitu:

**H<sub>05</sub> :** Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.

**H<sub>a5</sub> :** Tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa

